

Pendidikan dan Cita-Cita Masyarakat Demokratis dalam Tinjauan Kritis John Dewey

Tubagus Damanhuri¹, Gede Agus Siswadi²

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

e-mail: tubagusdamanhuri@mail.ugm.ac.id^{1*}, gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id²

Abstrak

Artikel ini membahas tinjauan kritis terhadap persoalan pendidikan dan masyarakat melalui perspektif John Dewey. Persoalan ini menjadi penting untuk dibahas guna menemukan titik temu persoalan pendidikan dengan cita-cita masyarakat demokratis. Objek material pembahasan ini adalah pendidikan dan masyarakat dan objek formalnya adalah pandangan filsafat pendidikan John Dewey mengenai pendidikan dan sosial masyarakat. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif/kepuustakaan dengan unsur metode deskriptif, interpretatif, koherensi intern, dan kesinambungan historis yang kemudian dianalisis secara kritis-reflektif oleh penulis. Hasil penelitian menemukan bahwa ketika memasuki persoalan pendidikan di dalam masyarakat dalam perspektif John Dewey, setidaknya ada beberapa hal problematika yang hadir. Pertama, proses pendidikan erat kaitannya dengan lingkungan sosial-masyarakat di sekitarnya. Kedua, realitas masyarakat sangatlah beragam, baik nilai, corak, tujuan, ataupun kepentingan yang berbeda-beda. Ketiga, masyarakat demokratis hanya hadir dalam negara yang demokratis, terutama demokrasi dalam pendidikan. Penulis sebagaimana Dewey, mengharapkan bahwa proses pendidikan harus didukung dan mendukung cita-cita masyarakat demokratis, baik yang diusahakan setiap individu-individunya maupun negara. Pendidikan mesti bertumpu pada kenyataan dan perbaikan kehidupan yang nyata.

Kata Kunci: *Pendidikan, Masyarakat, Demokrasi, Filsafat, John Dewey*

Abstract

This article discusses a critical review of issues of education and society from John Dewey's perspective. This issue is important to be discussed to find common ground issues of education with the ideals of a democratic society. The material object of this discussion is education and society and the formal object is the view of John Dewey's educational philosophy on education and social society. This article uses qualitative/library research with elements of descriptive, interpretive, internal coherence, and historical continuity methods which are then analysed critically-reflexively by the author. The results of the study found that when entering the issue of education in society from John Dewey's perspective, there were at least some problematic issues that were present. First, the educational process is closely related to the surrounding social environment. Second, the reality of society is very diverse, both values, styles, goals, and different interests. Third, a democratic society is only present in a democratic country, especially democracy in education. The author, like Dewey, hopes that the educational process must be supported and support the ideals of a democratic society, whether pursued by individuals or by the state. Education must be based on reality and real-life improvement.

Keywords: *Education, Society, Democracy, Philosophy, John Dewey*

1. Pendahuluan

Apa arti pentingnya pendidikan bagi suatu masyarakat? Dapatkah pendidikan memberi dampak perubahan bagi masyarakat? Sejauh mana masyarakat benar-benar menaruh perhatian pada aspek pendidikan bagi individu-individunya? Dan bagaimana filsafat pendidikan melihat persoalan-persoalan pendidikan dan masyarakat? Beberapa pertanyaan ini menjadi penting untuk kita perhatikan secara serius, karena pendidikan merupakan aspek yang fundamental bagi individu dan karenanya sosial masyarakatnya.

Jika kita mencermati pendidikan dalam kosakata bahasa Indonesia lebih mengacu pada universum nilai dan aktivitas lebih luas, bukan sekadar proses belajar-mengajar di kelas. Kata pendidikan mengacu pada berbagai macam aktivitas, mulai dari yang sifatnya produktif-material sampai kreatif-spiritual, mulai dari proses peningkatan kemampuan teknis (skill) sampai pada pembentukan kepribadian yang kokoh dan integral. Sebuah kegiatan yang mampu mengembangkan karakter anggotanya. Pendidikan mengembangkan karakter melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral, dsb. Selain itu kita tentu setuju bahwa sekolah semestinya peka terhadap permintaan dan tuntutan yang ada dalam masyarakat (Doni Koesoema, 2004: 198).

Lebih lanjut, kata pendidikan dalam bahasa Indonesia juga mengacu pada pemahaman yang lebih luas dibandingkan dengan kata pengajaran. Pengajaran lebih berkaitan dengan konteks pedagogis-didaktis dalam relasi antara guru dengan murid di dalam kelas dalam kerangka tujuan pembelajaran. Menurut J. Drost (1999) misalnya, perlulah dibedakan antara apa yang disebut dengan 'proses mengajar dan belajar' yang terdiri atas kegiatan mengajar dan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Mengacaukan keduanya bisa membawa 'malapetaka' atau 'musibah' yang melanda persekolahan kita.

Oleh karena itu, dalam telaah ini, pendidikan dapat didefinisikan sebagai 'usaha sadar yang ditujukan bagi pengembangan diri manusia secara utuh, melalui berbagai macam dimensi yang dimilikinya (religius, moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusional, relasional, finansial, dsb) demi proses penyempurnaan dirinya secara terus menerus dalam memaknai hidup dan sejarahnya di dunia ini dalam kebersamaan dengan orang lain, serta keterlibatan dirinya dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Di samping itu kita juga perlu memahami filsafat pendidikan dengan baik. Karena filsafat pendidikan dapat dijadikan sebagai motor penggerak perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan humanis (Mukhrizal Arif, 2014:15).

Brubacher (1950) menjelaskan bahwa filsafat pendidikan mempunyai hubungan erat dengan ilmu pendidikan atau pedagogik. Terhadap filsafat, seni pendidikan itu harus menantikan suatu pola bertindak. Sebaliknya, pemecahan masalah dalam filsafat pendidikan sangat memerlukan suatu seni pendidikan. Filsafat tidak akan dapat mewujudkan teorinya menjadi kenyataan, hanya dengan memikirkan teori menjadi kenyataan, hanya dengan memikirkan teori-teori itu saja. Seni pendidikan atau mendidik inilah yang dapat melakukan dan melaksanakan hal itu. Suatu filsafat pendidikan yang selalu menghendaki agar kebenarannya dapat diuji coba dalam praktik, tentu keadaannya tergantung kepada seni pendidikan. Pendidikan mesti mempunyai landasan filosofis disertai landasan ilmiah yang normatif, untuk melaksanakan ide-ide dalam kenyataan, tindakan, perilaku, dan pembinaan kepribadian (M. Anwar, 2014:38).

Dengan demikian, penulis berusaha menelusuri dan meninjau secara kritis persoalan pendidikan dan masyarakat melalui analisis pemikiran filsuf pendidikan John Dewey. Mengingat pemikiran John Dewey masih relevan dengan kondisi persoalan pendidikan kekinian, hanya saja perlu ditelaah dan dikontekstualisasikan dengan pembahasan yang relevan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku manusia yang dapat diamati dan diarahkan pada individu secara utuh (Gunawan, 2013:82). Dalam kata lain, penelitian kualitatif atau literatur adalah penguraian metode tertentu yang dipakai untuk menentukan studi literatur dengan alasan-alasan ilmiah seperti: kronologis, sudut pandang

tertentu, berkaitan dengan Ibnu persoalan pendidikan dan masyarakat dalam pandangan kritis John Dewey.

Adapun metode penelitian ini meliputi: metode pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Dalam metode pengumpulan data ditentukan dengan cara penelitian pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sumber primer maupun sekunder yang dipandang ada relevansinya dengan bahan penulisan. Mengutip Bakker & Zubair (1990:85-88), peneliti menggunakan metode analisis-filosofis dan penyajian data sebagai berikut, yaitu: a) Interpretasi, yakni pandangan atau visi filsafat pendidikan John Dewey diberi pada segi-segi yang relevan bagi tema atau masalah yang pembahasan mengenai pada asumsi-asumsi yang melandasi pemikiran John Dewey; b) Koherensi intern. Yakni setiap konsep atau tema atau masalah mengenai pendidikan dan masyarakat mendapat artian dalam koherensinya dengan semua ide-ide dalam visi John Dewey. Kemudian berusaha menemukan arti yang sebenarnya yang paling cocok. Sehingga dapat memperoleh arti yang berbeda atau serupa dalam sudut pandang refleksi kritis penulis; c) Kesenambungan historis. Hal ini berkaitan dengan latar belakang dan tradisi yang pemikiran dari sisi historis-sosial John Dewey yang kemudian menghasilkan konsepsi yang berbeda. Sehingga penulis meneliti kesenambungan historisnya. Kemudian penulis berusaha melihat sisi historis tersebut dalam suatu pandangan yang aktual dan relevan dengan zaman; d) Deskripsi. Analisis kritis dari Pemikiran John Dewey mengenai permasalahan pendidikan dan masyarakat kemudian dapat disajikan dengan jernih dan tepat dalam pembahasan ini.

2. Hasil Penelitian

2.1 John Dewey dan Filsafat Pendidikan

John Dewey merupakan filsuf besar Amerika, lahir pada 20 Oktober 1859 hingga 1952. Joy Martin (2002:200) menuturkan bahwa ide-ide Dewey selalu fokus pada kemajuan, bukan pada revolusi, sehingga berfokus pada perbaikan pengalaman, dan karenanya ide progresivismenya pada dasarnya ialah konservatif dalam filsafat dan liberal dalam aktivitas. Pembaca Dewey harus memahami bahwa liberalisme Dewey adalah ciptaannya sendiri dan bukan upaya untuk meniru "tradisi liberal" abstrak.

Ciri khas filsafat Dewey adalah bahwa logika dan penyelidikan filosofis bersifat instrumental, yaitu, dirancang untuk menciptakan dan melanjutkan proses pemikiran; pikiran itu harus mengalir ke dalam tindakan; bahwa semua pikiran dan tindakan bergantung dan hidup melibatkan risiko yang berkelanjutan, bukan kepastian; bahwa pemikiran yang diubah menjadi tindakan secara alami mengalir ke dalam kehidupan sosial, pengalaman, dan aktivitas yang sarat dengan peluang; bahwa pendidikan adalah ujian filsafat yang terbaik; dan bahwa perubahan sosial dapat menjadi konsekuensinya (Joy Martin, 2002:236).

Dewey meyakini bahwa pendidikan sebagai kecerdasan terorganisir akan membentuk kembali tatanan sosial melalui efek transformatifnya pada kaum muda. Dewey berasumsi bahwa jika sekolah mengorganisir intelegensi manusia secara efektif, demokrasi akan menjadi hasil yang tak terelakkan. Dan jika warga negara yang demokratis muncul, mereka akan mengatur pendidikan, dan pada gilirannya pendidikan akan menjadi lebih demokratis (Joy Martin, 2002:245).

Progresivisme merek Dewey, yang berusaha menyempurnakan demokrasi di dasar Amerika, dan penentangannya terhadap progresivisme globalis Wilson dan lainnya mencerminkan keyakinan pribadinya tentang bagaimana masyarakat Amerika harus berkembang. Dia menolak materialisme dialektis dan mendukung eksperimentalisme; dia menolak kekerasan sebagai instrumen perubahan yang dipilih, demi membawa perubahan melalui evolusi damai.

Dalam konteks filosofi pendidikan, John Dewey (1915) melalui karyanya *'Democracy and Education'* menegaskan bahwa filsafat pendidikan bukan pola pemikiran yang sudah jadi, karena melibatkan perumusan pembiasaan dan moral yang selaras dengan kehidupan sosial kontemporer. Dalam analisisnya, filsafat pendidikan merupakan suatu perumusan secara tegas dan benar tentang problema-problema pembentukan mental dan moral, dalam kaitannya menghadapi tantangan yang timbul pada kehidupan sosial masa kini. Sehingga pembangunan kembali filsafat, pendidikan, dan cita-cita ideal sosial, serta metodenya harus berjalan secara serempak. Jika pada saat ini dirasakan

perlunya pembangunan kembali pendidikan, maka kebutuhan ini mengharuskan diadakan peninjauan kembali terhadap suatu pemikiran dasar-dasar sistematika tradisional. Hal itu, sebagai akibat adanya perubahan sosial yang mendasar, menyertai kemajuan ilmu pengetahuan, revolusi industri, dan perkembangan demokrasi (M. Anwar, 2014:40-41).

Secara sederhana, filsafat pendidikan dalam pemikiran John Dewey dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, hubungan antara teori dan praktik terikat dalam suatu hubungan yang saling mengontrol. Teori dikontrol oleh pelaksanaan praktik dan berlaku sebaliknya. Praktik yang baik yang baik dan berlaku sebaliknya. Praktik yang baik didasarkan pada teori yang baik pula, sehingga pendidikan merupakan suatu proses pembaruan makna-makna dan pengalaman melalui suatu proses transmisi dalam pendidikan (M. Anwar, 2014:42). Sebagaimana yang dikemukakan Dewey yaitu *education was shown to be a process of renewal of the meaning of experience through a process of transmission* (Dewey, 1915: 346).

Kedua, adanya pendekatan terhadap problematika sosial pada masa tertentu. Perumusan teori pendidikan yang ada, harus merupakan hasil penggalian dan kajian dari kenyataan atau problem sosial yang dihadapi dan berlaku pada saat itu. Sehingga, rumusan itu dapat disebut sebagai pemikiran filosofis, untuk memecahkan problem sosial atau pendidikan. Jadi, pemikiran filosofis merupakan instrumen atau alat dalam menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat. Karena, adanya perubahan sosial dalam cita-cita sosial, tentang nilai dan norma yang mengikuti kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan demokrasi. Pendekatan sistem terhadap problematik sosial tadi merupakan suatu sikap mental, kemudian dikenal dengan sebutan metode pembaruan sosial dan metode pemecahan masalah (M. Anwar, 2014:42).

Ketiga, hubungan antara filsafat dan teori pendidikan. Pengertian ini diambil dari rumusan filsafat pendidikan sebagaimana telah dikemukakan, yakni pembangunan kembali filsafat, pendidikan, dan cita-cita ideal sosial, yakni adanya hubungan antara filsafat dan teori pendidikan. Secara konseptual, John Dewey menjelaskan bahwa *“education is that reconstruction or reorganization of experience which adds to the meaning of experience, and which increases, ability to direct the course of subsequent experience”* (M. Anwar, 2014:42).

Keempat, pembangunan bidang - bidang sosial yang dilakukan secara terintegrasi atau bersentuhan antara satu dengan lainnya. Adanya kesejajaran dan searah tujuan dalam bidang-bidang pembaharuan sosial dalam sistem pendidikan dan pemikiran filsafat diperlukan untuk mengembangkan sikap mental dan moral sebagai cita-cita ideal masyarakat. Selain itu, juga diperlukan untuk mengimbangi perubahan kemajuan yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan, industri, dan demokrasi (M. Anwar, 2014:43).

Dewey merupakan seorang pragmatis, tetapi pemikirannya sering disebut instrumentalis. Tujuan filsafat Dewey adalah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia agar lebih baik di dunia dan sekarang. Dengan kata lain, tugas berfilsafat berarti memberikan garis-garis pengarahannya bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Dewey memandang bahwa tujuan pendidikan tidak harus seputar pengadaan pra keterampilan yang ditentukan, melainkan realisasi potensi penuh seseorang untuk kebaikan yang lebih besar (Kuswana, 2013:36).

Selain membantu anak didik menyadari potensi optimal mereka, Dewey menyatakan bahwa pendidikan dan sekolah adalah instrumental dalam menciptakan perubahan sosial dan reformasi. Pendidikan merupakan peraturan dari proses yang akan datang untuk berbagi dalam kesadaran sosial, dan penyesuaian kegiatan individu atas dasar kesadaran sosial ini adalah satu-satunya metode yang diyakini sebagai rekonstruksi sosial (Pohan, 2014:158).

2.2 Implikasi dan Realitas Sosial Masyarakat

Dalam sudut pandang Dewey (1915:87), ia menjelaskan bahwa setiap individu mau tidak mau terlibat dalam banyak kelompok yang beragam dengan berbagai lingkungan yang berbeda. Hal ini dapat terlihat jelas di banyak negara modern dengan keragaman populasi yang besar dari berbagai bahasa, agama, kode moral, dan tradisi. Bagi Dewey, karena kondisi multiplisitas dalam suatu masyarakat tersebut membuat istilah masyarakat atau komunitas menjadi ambigu.

Istilah masyarakat memiliki pengertian *eulogistik* atau normatif, dan memiliki pengertian deskriptif, baik dalam makna *de jure* dan makna *de facto*. Dalam filsafat sosial, konotasi yang pertama hampir selalu paling menonjol. Masyarakat dipahami sebagai satu oleh sifatnya. Tetapi ketika kita melihat fakta-fakta yang ditunjukkan oleh istilah itu alih-alih membatasi perhatian kita pada konotasi intrinsiknya, kita tidak menemukan kesatuan, tetapi pluralitas masyarakat, termasuk baik dan buruknya.

Hal itu akan berdampak pada sektor pendidikan. Karena setiap pendidikan yang diberikan oleh suatu kelompok cenderung untuk mensosialisasikan anggotanya, dimana kualitas dan nilai sosialnya erat kaitannya dengan kebiasaan dan tujuan kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam mencari suatu ukuran bermasyarakat, kita harus menghindari dua pandangan ekstrim. Pertama, bahwa kita tidak dapat mengatur, di luar pemikiran kita sesuatu yang kita anggap sebagai masyarakat yang ideal. Kedua, kita harus mendasarkan konsepsi kita pada masyarakat yang benar-benar faktual, untuk mendapatkan jaminan bahwa cita-cita kita dapat dipraktekkan dengan nyata. Singkatnya, kita harus menyadari bahwa ada banyak kepentingan yang secara sadar dikomunikasikan dan dibagikan; dan ada titik-titik kontak yang bervariasi dan bebas dengan cara-cara pergaulan dalam suatu masyarakat.

John Dewey (1915) setidaknya merespon secara kritis realitas sosial masyarakat kepada dua aspeknya: Pertama, negara yang diperintah secara despotik. Bahwa tidak ada suatu relasi yang *fair* dan murni memiliki timbal-balik karena sarat dengan kepentingan. Hal inilah yang dinilai Dewey bahwa pemerintah sering kali memberikan stimulus dan respons yang berat sebelah terhadap masyarakat yang diperintah. Kurangnya interaksi yang bebas dan adil tidak lain bersumber dari berbagai kepentingan sehingga membuat perkembangan intelektual menjadi tidak seimbang.

Dewey menegaskan bahwa harus ada berbagai macam usaha dan pengalaman keterlibatan bersama, baik dalam sosial maupun pendidikan. Jika tidak, pengaruh yang mendidik akan menjelma menjadi seorang tuan (*masters*), dan orang yang didik menjadi budaknya (*slaves*). Dewey terilhami dari Plato yang mendefinisikan bahwa seorang budak adalah orang yang menerima dari orang lain suatu tujuan yang mengendalikan perilakunya, mengendalikan kebebasan hidupnya. Kondisi ini adalah faktual, bahkan dalam ranah hukum sekalipun (antara hakim dan yang dihakimi). Kita dapat melihat fakta bahwa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas yang bermanfaat secara sosial, tetapi hal demikian tidak mereka pahami karena tidak berasal dari minat pribadinya oleh sebab realitas sosial membentuknya menjadi seperti 'budak' dalam lingkungan sosial masyarakatnya.

Poin kedua, Dewey mengutarakan kritiknya pada realitas sosial bahwa dalam sebuah lingkungan sosial setiap unsurnya tidak memiliki kepentingan timbal-balik. Tidak lain karena setiap kelompok memiliki sisi isolatifnya ataupun eksklusivitasnya yang dapat berdampak buruk bagi semangat kehidupan sosial. Tindakan tersebut jelas-jelas menutup diri dari interaksi sosial yang lebih luas. Sisi eksklusivitas itu sering kali hadir karena memiliki motif atau tujuan utama untuk melindungi apa yang telah diperolehnya, bukan pada reorganisasi dan kemajuan dalam suatu hubungan yang lebih luas.

Hal itu yang membuat suatu masyarakat sosial dalam negara menjadi terasing, seolah-olah tidak memiliki kehidupan yang lebih besar. Bahkan hal ini berdampak dengan adanya jurang pemisah kehidupan, seperti membedakan sekolah dengan kepentingan rumah dan masyarakat; membedakan porsi si kaya dan si miskin, ilmu yang harus dipelajari dan tak perlu dipelajari, dan banyak hal lainnya. Sehingga menjadi jelas bahwa suatu sikap kelompok atau komunitas yang eksklusif dalam masyarakat membuat kekakuan dan formalisasi kehidupan dalam cita-cita statis dan egois dalam suatu kelompok semata.

2.3 Pendidikan sebagai Fungsi Sosial

Dewey (1915) menegaskan arti penting pendidikan bagi sosial masyarakat, yaitu pendidikan sebagai fungsi sosial. Dalam menjelaskan pendidikan sebagai fungsi sosial, Dewey menderivasi gagasan tersebut dalam empat aspeknya. *Pertama*, sifat dan makna lingkungan. Seorang individu yang belum dewasa amat dipengaruhi oleh lingkungan atau kelompok sosial yang membentuk dirinya.

Sehingga dalam pengertian etimologisnya, pendidikan hanya sebagai proses memimpin atau membesarkan individunya. Tantangannya adalah, individu menjadi cenderung dibentuk pada standar aktivitas sosialnya, dan karenanya, menarik dirinya pada ide-ide kelompok sosialnya. John Dewey melihat lingkungan harus dimaknai sebagai transformasi pengalaman sampai si individu yang belum dewasa itu mengambil bagian dari sosialnya. Bukan untuk sekadar mengasimilasi pandangan orang-orang yang lebih tua akan dirinya, agar menemukan dirinya yang khas di tengah lingkungannya.

Kedua, lingkungan sosial. Sebagai manusia yang aktivitasnya berhubungan dengan orang lain, maka ia tak terlepas dari lingkungan sosialnya. Ia terhubung dan terjalin dalam suatu perilaku sosialnya. Sehingga pada sisi individu yang belum dewasa, lingkungan sosial cenderung membuat dirinya mempertimbangkan tindakan luar/sosial daripada mental dan emosional perilakunya, dan karenanya seakan lingkungan sosial memodifikasi keadaan dirinya. Lingkungan sosial harus memberi ruang bagi individu untuk secara bertahap berasimilasi dengan keadaan kelompok sosialnya.

Ketiga, sosial sebagai medium pembelajaran. Keadaan sosial sebagai pembelajaran bagi seorang individu hendaknya bukan untuk mentransmisikan ilmu semata pada dirinya, melainkan juga membentuk disposisi mental dan emosional perilaku individu dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan memahami konsekuensi tertentu. Sehingga lingkungan sosial dapat memberikan edukasi dengan mendorong kompetensi individu-individunya.

Keempat, sekolah sebagai lingkungan khusus (istimewa). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lingkungan khusus tertentu untuk menunjang pembelajaran seorang individu secara intensif, yang lingkungan sosial itu disebut sebagai sekolah. Mengapa? Agar edukasi yang diberikan pada seorang individu benar-benar sebuah pendidikan yang menumbuhkan, mengembangkan, dan membesarkan potensi-potensi kreatif dalam dirinya.

Sederhananya, John Dewey menganggap bahwa perkembangan dalam diri orang muda dari sikap dan watak yang diperlukan untuk kehidupan yang berkelanjutan dan progresif masyarakat tidak dapat terjadi dengan penyampaian langsung tentang kepercayaan, emosi, dan pengetahuan. Itu terjadi melalui perantara lingkungan. Lingkungan terdiri dari jumlah total kondisi yang bersangkutan dalam pelaksanaan aktivitas karakteristik makhluk hidup.

Lingkungan sosial terdiri dari segala aktivitas sesama makhluk hidup yang terikat dalam menjalankan kegiatan salah satu anggotanya. Ini benar-benar edukatif karena berdampak derajat dimana seorang individu berbagi atau berpartisipasi dalam beragam aktivitas bersama lingkungannya. Dengan melakukan bagiannya dalam aktivitas yang terkait, individu menyesuaikan tujuan yang menggerakkannya, menjadi akrab dengan metode dan materi pelajarannya, memperoleh keterampilan yang dibutuhkan, dan dipenuhi dengan semangat emosionalnya. Hal tersebut diharapkan agar terdapat nilai edukatif yang lebih dalam pada karakteristik individu yang muda dengan secara bertahap mengambil bagian dari kegiatan berbagai kelompok yang kemudian menjadi *sense of community*.

Ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, maka dianggap perlu untuk menyediakan lingkungan sosial yang secara khusus menjaga memelihara kemampuan diri manusia yang belum matang. Tiga hal yang menjadi nilai penting dari fungsi lingkungan khusus ini adalah: menyederhanakan dan mengatur faktor-faktor disposisi yang ingin dikembangkan; memurnikan dan mengidealkan adat-istiadat sosial yang ada; menciptakan lingkungan yang lebih luas dan seimbang dalam pendidikan (Dewey, 1915: 11-25).

2.4 Menyoal Negara Demokrasi

Dalam bukunya "*The Public and its Problem*", John Dewey (1927) memperhatikan secara serius perihal kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Dewey mengamini bahwa demokrasi secara esensial merupakan bentuk yang ideal dalam suatu negara, sebagaimana ucapnya "*democracy as an ethical and social ideal*". Demokrasi menghendaki adanya suatu pemerintahan yang representatif dari masyarakatnya. Yang dimaksud dengan 'representatif' adalah para pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat umum maupun khusus yang mewakili berbagai unsur-unsurnya yang kemudian membela kepentingan publik di atas kepentingan individu maupun kelompoknya.

Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah pejabat publik tersebut memiliki identitas ganda, di satu sisi dia sebagai individu dan di sisi lain sebagai “representasi” yang mewakili kepentingan publik. Terlebih, kerap kali adanya monopoli dari kalangan tua yang turut andil dalam usaha-usaha mewakili publik dengan alasan memiliki banyak pengalaman daripada generasi muda,

Dewey menilai bahwa pejabat publik yang duduk sebagai pemerintah itu kerap kali mengedepankan hasrat kepentingan diri, keluarga, ataupun kelompoknya daripada kepentingan publik. Tidak lain karena mereka terpengaruh oleh hasrat kekuasaan dan ‘keuntungan’ yang bisa lebih banyak didapatkan. Fakta ini yang kemudian menjadi kemunduran dalam cita-cita kehidupan yang demokratis.

Memang, demokrasi menghendaki individu sebagai rakyat untuk dapat hidup dalam kebebasan kreatif yang dapat dilakukannya, namun ketika individu itu menjadi pejabat publik maka hal tersebut mesti ditekan karena sekali lagi harus mengutamakan kepentingan publik. Sebagaimana kesaksiannya, Dewey berkata *“There has been a machinery of government, but it has been employed for purposes which in the strict sense are non-political, the deliberate advancement of dynastic interests”* (Dewey, 1927:74).

Persoalan demokrasi tidak lain adalah persoalan pejabat publik yang mengedepankan kepentingan pribadi, dan kemudian dinasti. Kekuasaan, kemuliaan, kekayaan, dan sejenisnya menjadi hal yang paling menarik bagi mereka yang hendak atau telah menjadi pejabat publik. Dewey (1927:81) menilai, *“All history shows how difficult it is for human beings to bear effectually in mind the objects for the nominal sake of which they are clothed with power and pomp; it shows the ease with which they employ their panoply to advance private and class interests.”*

Kritik Dewey terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat demokrasi mengajarkan pada kita untuk menilai itu dari suatu kritik historis. Sebagaimana penilaiannya bahwa *“to discuss democratic government at large apart from its historic background is to miss its point and to throw away all means for an intelligent criticism of it”*. Sehingga hal ini juga bisa menjadi cara pandang untuk menilai bagaimana situasi kondisi kehidupan sosial di tengah-tengah kita dalam suatu pandangan kritis-historis agar tak tercerabut relevansinya.

Lebih lanjut, Dewey memahami bahwa ‘Demokrasi’ memiliki banyak arti yang luas dan beragam. Namun secara lebih spesifik ia mengarahkan pada suatu bentuk yang konkret, yaitu demokrasi politik. Demokrasi bukan hanya praktik mengenai pemilihan pejabat publik semata, melainkan bagaimana suatu pemerintahan dapat dikontrol sedemikian rupa agar tetap mengedepankan kepentingan publik.

Demokrasi publik tidak memunculkan suatu gerakan sosial, melainkan melahirkan ide dan cita-cita yang menghendaki kemajuan, ketertiban, kebebasan dan hukum, kebaikan bersama dan kehendak umum yang menjadi inti dari demokrasi yang sebenarnya. Gerakan sosial hadir karena tafsiran masing-masing atas demokrasi ideal yang dipahaminya. Namun, bagaimanapun gerakan sosial dalam suatu kehidupan demokrasi tidaklah dibenarkan bilamana hanya mengedepankan kepentingannya sendiri, sebab bagaimanapun kehidupan publik tetaplah yang utama dalam demokrasi.

Oleh karena itu, bagi Dewey, segenap pemberontakan terhadap bentuk-bentuk pemerintahan dan kekuasaan yang telah mapan namun tidak demokratis menghendaki adanya suatu perubahan dengan gerakan sosial, seperti evolusi Amerika. Serta gerakan-gerakan sosial yang membatasi dominasi dan hegemoni pejabat publik atau suatu pemerintahan itu pun menjadi inti ideal dalam kehidupan demokrasi. Dan setiap orang di dalamnya terdorong secara alami untuk mencari dan menggapai kemajuan di tanah airnya sendiri.

2.5 Cita-Cita Demokrasi Ideal

Setidaknya, Dewey (1915:93) menilai dua kriteria yang merujuk pada kehidupan demokratis yang ideal. Pertama, bukan hanya adanya kepentingan bersama secara lebih dominan dan variatif, tetapi juga memiliki ketergantungan pada pengakuan kepentingan bersama sebagai faktor dalam kontrol sosial. Kedua, tidak hanya adanya interaksi yang lebih bebas antara kelompok sosial, tetapi

juga mengubah kebiasaan sosial dengan mengusahakan penyesuaian secara terus-menerus terhadap situasi-situasi baru yang lebih relevan.

Dalam konteks pendidikan, pertama-tama kita perlu memperhatikan bahwa realisasi suatu bentuk kehidupan sosial akan berkaitan dengan berbagai kepentingan yang menghendaki adanya kemajuan atau usaha penyesuaian keadaan. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam mewujudkan masyarakat demokratis melalui segala macam deliberasi dan pendidikan yang sistematis. Sebab masyarakat demokratis menolak prinsip otoritas eksternal dan beralih ke arah tindakan sukarela dan hal ini hanya dapat diciptakan melalui pendidikan. Bagi Dewey, demokrasi lebih dari sekadar bentuk pemerintahan; lebih dari itu demokrasi adalah tentang cara hidup yang saling membangun melalui pengalaman yang dikomunikasikan bersama. Sehingga setiap individu yang berpartisipasi dalam suatu masyarakat demokratis harus memiliki kepentingan bersama dengan orang lain dan melepaskan hambatan-hambatan kelas, ras, dan bahkan wilayah negara.

3. Simpulan

Dewey memandang bahwa pendidikan adalah proses sosial, namun dalam proses ini, pendidikan akan bersentuhan dengan banyak jenis masyarakat yang memiliki ciri dan karakteristik atau cita-cita sosial tertentu. Oleh karena itu Dewey menjelaskan bahwa setidaknya ada dua poin yang bisa dijadikan suatu ukuran nilai dalam bentuk sosial, yaitu (1) sejauh mana kepentingan kelompok dimiliki oleh setiap anggota masyarakatnya dan (2) kebebasan penuh interaksi dengan kelompok lainnya dalam suatu masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak diharapkan adalah masyarakat yang secara eksternal menghambat adanya hubungan bebas dan keterlibatan pengalaman bersama di antara anggota masyarakat. Suatu masyarakat yang membuat ketentuan untuk partisipasi dalam kebaikan semua anggotanya dengan persyaratan yang sama dan yang menjamin penyesuaian kembali yang fleksibel dari lembaga-lembaganya melalui interaksi berbagai bentuk kehidupan yang terkait bisa dinilai sebagai demokratis. Masyarakat demokratis harus memiliki jenis pendidikan yang memberikan individu kebebasan aktif dalam relasi dan kontrol sosial, serta kebiasaan berpikir yang menghendaki perubahan sosial secara damai, bukan dengan kekacauan.

Daftar Pustaka

- A, Doni Koesoema. (2004). *Pendidikan Manusia Versus Kebutuhan Pasar*. Jakarta: Penerbit Kompas. Buku
- Anwar, M. (2015). *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Arif, Mukhrizal, dkk. (2014). *Pendidikan PosModernisme: Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dewey, John. (1915). *Education and Democracy*. New Delhi: Aakar Books.
- _____. (1927). *Public and Its Problems*. US: Henry Holt and Company.
- J. Drost, SJ. (1999). *Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Martin, Joy. (2002). *The Education of John Dewey*. New York: Columbia University Press.
- Pohan, Jusrin Effendi. (2019). *Filsafat Pendidikan: Teori Klasik Hingga Kontemporer dan Problematikanya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.